

Dialog Budaya Bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

Memberi Manfaat untuk Seluruh Warga

Keistimewaan Yogyakarta merupakan sesuai yang istimewa bagi masyarakat dalam melestarikan budaya yang terkait erat dengan peradaban. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad memfasilitasi pembinaan pelaku budaya hingga tingkat desa.

KEHADIRAN 56 desa budaya di Jogjakarta mengindikasikan bahwa Keistimewaan Jogjakarta bukan hanya ada di tingkat satu atau provinsi. Keistimewaan Jogjakarta sudah merambah hingga kabupaten dan kota. Bahkan, sampai ke tingkat desa dan padukuhan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di depan ratusan peserta yang menghadiri acara Dialog Budaya di Desa Budaya Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, pada Jumat (27/12). "Lha kalau enggak (sampai tingkat bawah) kan ndak bisa membawa manfaat untuk seluruh warga masyarakat," tegas pejabat yang biasa disapa Ngarso Dalem tersebut. Dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan gamelan, pakaian perawat, dan alat musik untuk desa budaya.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu mengatakan, penyerahan gamelan ini merupakan kali pertama dilakukan oleh pemerintah daerah. Dia ingin agar setelah peralatan diterima oleh desa budaya langsung diikuti dengan langkah pembinaan untuk masyarakat. Sultan menyebut ada dua aspek penting. Pertama, yakni pelatihan. Masyarakat, kata dia, jika mengalami kesulitan dalam melatih bisa mengajukan permintaan untuk memperoleh guru pembimbing.

Itu mencakup guru untuk mengajari menari, bermain gamelan, atau tatah sungging atau jenis kesenian lain. "Kalau ada desa yang susah untuk mencari guru, komunikasikan saja sama tingkat satu (Pemerintah Provinsi DIY)," ujarnya. Sultan memastikan, Pemprov DIY siap untuk menyalurkan guru seni ke daerah. Sebab, Pemprov DIY memiliki akademi komunitas yang setiap tahun meluluskan orang-orang yang bergelut di dunia seni. Baik itu tari, rupa, musik ataupun pertunjukan. "Bagi yang mengajar, nanti akan kami beri honorarium," jelasnya.

Permintaan untuk mendatangkan guru untuk melatih harus berasal dari desa. Sebab, jika tidak ada permintaan berarti di daerah tersebut sudah bisa berlatih secara mandiri. "Yang lebih tahu desa. Jadi, saya mohon para kepala desa ataupun pendamping budaya jangan merasa kami tahu semua. Enggak. Yang tahu kebutuhan yang ada di desa," tegasnya.

Aspek kedua yakni pembinaan untuk masyarakat desa. Sultan meminta jika ada kelompok seni di desa ingin mengadakan pagelaran tari agar meminta agar desa bisa memfasilitasi. Sultan tidak ingin jika nantinya desa mendapatkan Dana Keistimewaan (Danais) justru digunakan untuk *nanggap* seniman dari luar. "Lha *nanggap* kan bukan pembinaan. Ya *ming ngenteke duit* (cuma menghabiskan uang). Masyarakat *ming nonton* (masyarakat cuma nonton)," ujarnya.

Sultan berharap warga tidak melulu mengundang seniman dari luar untuk pentas. Justu, warga sendiri yang bisa menampilkan pertunjukan. Sebab, Dana Keistimewaan juga bisa digunakan untuk memberikan honor kepada masyarakat yang tampil.

Sultan mengingatkan agar prinsip pembagian honor disesuaikan. Contohnya, besaran

honor untuk perawat yang baru berkiprah satu tahun dengan perawat yang sudah berkiprah selama sepuluh tahun harus berbeda. Pemerintah, lanjutnya, ingin memberikan apresiasi bagi para seniman yang memang hidup dari dunia seni itu sendiri.

"Pilihan bisa menari, lalu menjadi profesi seseorang untuk bisa hidup layak. Ya, yang bisa menghargai siapa kalau bukan kita, pemerintah," ungkapnya. Dia mengingatkan pentingnya rasa adil. Mengingat hal ini merupakan pembinaan.

Oleh karenanya, dia ingin agar semua mendapat kesempatan yang sama. Sehingga kepala desa bisa mengatur antara seniman yang sudah dikenal dan belum dikenal. "Yang belum dikenal, ya diberikan ruang karena ini pembinaan," pintanya.

Kendati Dana Keistimewaan diminta untuk digunakan pada pembinaan, Sultan mengatakan, bukan berarti masyarakat tidak boleh membuat pagelaran dengan mengundang seniman dari luar. Namun, dia ingin agar seniman yang berada di daerah yang menjadi prioritas.

"Bukan berarti *nanggap* tidak boleh. Karena setelah dibina nanti kan ditanggap, dalam arti dikasih upah," terangnya.

Lebih lanjut, Sultan mengingatkan kembali arti penting kebudayaan. Bagaimana bicara budaya tidak sekadar pengertian budaya merupakan upacara tradisi atau tari. "Tidak. Yang dimaksud budaya itu identik dengan peradaban. Berarti ada tata krama, etika," tegasnya.

Sultan berharap, dengan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan terkait budaya yang hakikatnya berbicara peradaban. Hal ini agar sungguh-sungguh dapat dijaga. "Karena peradaban ini masih kental, masih dipahami seluruh warga masyarakat," tandasnya. (har/amd/fj)



KUNDHA KABUDAYAN: Kundha Kabudayaan Kepala Dinas Kebudayaan DIY Aris Eko Nugroho menyaksikan penyerahan bantuan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Dialog Budaya di Desa Budaya Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, pada Jumat (27/12).

Desa Budaya Angkat Karakter dan Nilai Kejogjakartaan

DINAS Kebudayaan (Disbud) DIY atau Kundha Kabudayaan terus berupaya melakukan pengembangan kebudayaan secara luas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menetapkan desa budaya. Saat ini jumlah desa budaya di DIY mencapai 56 desa. Hal itu sesuai Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penetapan Desa atau Kelurahan Budaya.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, salah satu langkah pengembangan desa budaya yang dilakukan yakni memberikan bantuan. Termasuk bantuan berupa gamelan, pakaian untuk perawat, dan alat musik lainnya. Khusus untuk gamelan, masih terdapat 23 desa budaya belum mendapatkan. "Satu sampai dua tahun mendatang diharapkan bisa mendapatkan gamelan perunggu laras selendro pelok," kata Aris.

Dalam penyerahan gamelan, pakaian perawat, dan alat musik di Desa Budaya Sinduharjo, Ngaglik, pada Jumat (27/12), diserahkan 16 gamelan perunggu laras pelok selendro untuk desa budaya. Sedangkan bantuan untuk perawat diberikan untuk 12 desa budaya.

Turut diberikan juga peralatan gamelan besi pengu kuning laras selendro pelok untuk 20 penerima. Meliputi sanggar, paguyuban seni, dan organisasi masyarakat. Kundha Kabudayaan DIY juga menyerahkan empat set peralatan kesenian dan keroncong. "Di tahun 2019 telah dihasilkan gendhing desa budaya," bebarnya.

Kundha Kabudayaan DIY, kata Aris, juga memberikan fasilitasi di luar kegiatan desa budaya. Tercatat lebih dari 360 fasilitasi untuk pegiat seni di seluruh DIY dan fasilitasi pemangku adat sebanyak 12 kali. Selain itu, ada puluhan kerja sama dengan komunitas pemerhati seni dan budaya di DIY. Menurut Aris, kegiatan pengem-

ban dan pembinaan tahun 2019 meliputi 17 kegiatan. Di antaranya, pembekalan pendamping desa budaya, akreditasi desa budaya, gelar potensi desa budaya, gelar potensi desa budaya, gelar potensi desa budaya, *workshop*, sarasehan, seminar, pentas seni Selasa Wage, dan fasilitasi upacara adat.

Dalam rangka pengembangan kebudayaan secara luas, program kegiatan desa atau kelurahan berbudaya ini merupakan salah satu bentuk unggulan program pengembangan budaya yang dilakukan oleh Kundha Kabudayaan DIY.

Adanya program pengembangan desa budaya diharapkan karakter dan nilai-nilai kejogjakartaan dapat terangkat dan terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Terutama di lingkungan kelurahan atau desa budaya.

Kundha Kabudayaan DIY berusaha melakukan kegiatan-kegiatan berupa pendampingan tenaga teknis, fasilitasi sarana dan prasarana, serta fasilitasi penyelenggaraan *event* atau agenda budaya dan juga gelar potensi.

Aris menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan sebagai sarana untuk memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di masyarakat. "Khususnya di DIY," tegasnya.

Pembinaan dan pengembangan desa budaya, kata Aris, mencakup beberapa hal. Yakni, ingin membangun desa budaya sebagai lembaga kebudayaan yang kreatif, inovatif, produktif, dan menyejahterakan masyarakat pendukungnya.

Desa budaya yang sudah berkembang diharapkan bisa sejahtera dan mandiri. Kehadiran desa budaya ini sekaligus untuk mempertahankan eksistensi budaya yang ada di desa atau kelurahan budaya. "Kami juga ingin meningkatkan kualitas kesenian yang ada di desa atau kelurahan budaya agar lebih maju dan dikenal luas," tandasnya. (har/amd/fj)



SANG PEMBINA: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama peserta Dialog Budaya di Desa Budaya Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, pada Jumat (27/12).

Usul Bantuan Lembaga Desa Budaya Terpisah dari APBDes

ADA beberapa masukan dan usulan dalam bersama peserta Dialog Budaya di Desa Budaya Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, pada Jumat (27/12). Salah satunya masukan dari perwakilan Desa Budaya Girisekar, Panggang, Gunungkidul. Ketua Desa Budaya Girisekar Nana Wasana mengatakan, desa budaya memiliki beban berat. Sayangnya, lembaga desa budaya tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola keuangan. Sebab, dana untuk desa budaya sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Usul saya, kalau bisa, lembaga desa budaya diberikan bantuan tersendiri yang terpisah dengan APBDes," pinta Nana.

Dia mencontohkan, antusiasme masyarakat untuk belajar gamelan di daerahnya sangat tinggi. Apalagi, setelah mendapatkan bantuan seperangkat alat gamelan dari Pemerintah Provinsi DIY. Masyarakat yang ingin belajar gamelan semakin banyak.

Namun, tenaga pengajar yang dimiliki tidak sebanding. Tenaga pengajar yang tersedia hanya para perawat senior. "Terus terang saja kami kekurangan tenaga pengajar," ujarnya.

Tidak bisa diaksesnya keuangan secara langsung membuatnya kesulitan untuk menambah tenaga pengajar. "Dengan dipisah, barang kali penggunaan anggarannya bisa di dinas kebudayaan kabupaten sehingga kami bisa memberikan insentif untuk pelatih," bebarnya. Usulan itu ditanggapi langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dia ber-



ANTUSIAS: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan penjelasan kepada peserta Dialog Budaya di Desa Budaya Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, pada Jumat (27/12).

pendapat jika nantinya antara lembaga budaya dengan desa dipisahkan makan harus dikoordinasikan dengan Pani Radya Kundha Kabudayaan. "Yang penting, sekarang itu kami baru fokus agar anggaran danais itu bisa masuk di APBD kabupaten," ujar Ngarso Dalem.

Sultan menjelaskan, bisa masuknya danais dalam anggaran kabupaten akan berimplikasi pada pengajuan usulan danais. Padukuhan maupun desa bisa mudah mengakses dan mengusulkan danais ke Pemerintah Provinsi

DIY melalui pemerintah kabupaten. "Nanti semua pengajuan lewat (pemerintah) kabupaten," terangnya.

Sultan menyatakan, besaran danais yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi DIY belum dibagi secara rinci. Nantinya, dia ingin ada aturan yang lebih jelas terkait pembagian danais. "Mungkin akan ada dialog lebih teknis. Yang paling penting itu untuk menentukan pola agar setiap desa bisa sama," jelasnya. (har/amd/fj)

Yang penting, sekarang itu kami baru fokus agar anggaran danais itu bisa masuk di APBD kabupaten."

SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO X
Gubernur DIY

Satu sampai dua tahun mendatang diharapkan bisa mendapatkan gamelan perunggu laras selendro pelok."

ARIS EKO NUGROHO
Kepala Dinas Kebudayaan DIY